

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat dalam memilih pemimpin di suatu daerah di tingkat desa. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin diwilayahnya secara langsung, rakyat juga secara terbuka dihadapkan dengan calon kepala desa yang akan menjadi pemimpinnya. Pemilihan Kepala Desa tentu identik dengan kampanye-kampanye yang berbau politik, karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin yang dapat membangun desa menjadi lebih baik (Fuadi, 2020).

Hal yang menarik untuk dikaji dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah tahapan kampanye yang dimana masing-masing calon kepala desa berlomba-lomba memperkenalkan diri, memberikan janji-janji, melakukan pendekatan dengan masyarakat desa, dan beberapa pendekatan lainnya melalui proses komunikasi politik, baik dilakukan secara langsung oleh calon kepala desa maupun oleh tim suksesnya (Rozi et al., 2019).

Pemilihan kepala desa merupakan arena politik demokrasi, dimana masyarakat seharusnya memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya. Namun disisi lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan dijumpai kekecewaan oleh sebagian masyarakat yang khawatir akan ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam pemilihan kepala desa seringkali menjadi konflik kekerasan dan anarkis (Wance, 2019).

Pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya, karena adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa panas dibandingkan pemilihan yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi hal mutlak. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih (Rivai, 2024).

Pilkades ditetapkan dengan adanya Undang-undang no. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa orientasinya tidak hanya menjadikan seseorang mendapatkan status sebagai kepala desa tetapi ada perebutan sumber daya yang lain yakni anggaran dana desa. Karena adanya perebutan itu maka dalam banyak kasus setiap pilkades di setiap desa selalu diwarnai dengan adanya konflik baik yang sifatnya pro atau kontra, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang (Falah & Fauzi, 2021a).

Dalam konteks itu maka fenomena ini juga menarik untuk diteliti pada pilkades di Desa Randuagung adalah proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan dimana para calon kepala desa berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan janji-janji dan melakukan money politics yaitu dengan cara membagikan uang kepada warga setempat dengan maksud agar warga desa mendukung calon kepala desa tersebut. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Randuagung terdapat 2 calon kandidat yaitu, Ahmad Hoiri dan Imam Syahroni. dari kedua calon tersebut Ahmad Hoiri adalah kepala desa sebelumnya dan mencalonkan diri untuk kedua kalinya, maka mayoritas masyarakat yang puas dengan hasil kerja Ahmad Hoiri, lebih memilih lagi untuk melanjutkan membangun desa.

Dari perhitungan suara Ahmad hoiri lebih unggul karena mendapatkan polling suara lebih banyak dari Imam Syahroni sebanyak 2.607 suara dan Imam Syahroni mendapatkan suara sebanyak 1.807 suara. Maka berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS tersebut sudah jelas jika Ahmad Hoiri yang berhasil menjadi kepala desa untuk kedua kalinya. berdasarkan pengamatan langsung di lapangan penulis menemukan adanya konflik yang terjadi setelah proses pemilihan kepala desa, dari pihak yang kurang puas dengan hasil perhitungan yaitu adanya ancaman terhadap penduduk yang memilih paslon no 1 untuk lanjut 3 periode, adapun bentuk ancaman adalah kekerasan fisik hingga harta bendanya, contohnya seperti pengeroyokan hingga pembacokan yang dilakukan oleh pihak yang merasa kurang puas dan ingin menjatuhkan kepala desa yang terpilih, dengan cara mencuri hewan ternak satu per satu sehingga membuat masyarakat

takut. memang tidak bisa di bohongi mayoritas warga desa rata rata suku madura, yang dimana kekalahan dari salah satu pihak adalah sebuah penghinaan menurut mereka, pada akhirnya salah satu dari mereka menghalalkan segala cara supaya kepala desa yang terpilih bisa mengundurkan diri sebagai kepala desa yang baru .

Berdasarkan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Randuagung dengan mengambil judul penelitian yaitu “konflik sosial pasca pemilihan kepala desa (pilkades) Di desa Randuagung kecamatan Randuagung Kabupaten lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk konflik Sosial yang terjadi setelah pemilihan kepala desa di Desa Randuagung?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik Sosial setelah Pemilihan Kepala Desa di Desa Randuagung?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi setelah pemilihan kepala desa di Desa Randuagung
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik sosial setelah Pemilihan Kepala Desa di Desa Randuagung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: *pertama* Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pola berpikir dan merupakan studi awal dalam penelitian selanjutnya, dan sebagai acuan bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini baik pada daerah yang sama maupun yang berbeda, *kedua* Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi dan memperdalam pemahaman peneliti dalam bidang pemerintahan khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis : *pertama* Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran maupun informasi kepada pembaca, *kedua* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang ilmu sosial.

